

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Agung Daniel Situmorang

NPP. 32.0153

Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: agungsitumorang42@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): Waste management is a challenge that continues to be faced by Pekanbaru City every year. This challenge is driven by the lack of waste reduction and handling and the limitations of waste management infrastructure. **Purpose:** This study aims to determine and analyze Collaborative Governance in waste management in Pekanbaru City, Riau Province, analyze supporting and inhibiting factors, as well as efforts made to overcome inhibiting factors. **Method:** The research approach used is qualitative descriptive with an inductive approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observations, and documentation. The theory used is Collaborative Governance from Ansell and Gash (2008), which includes four dimensions: initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes. **Result:** The results of the study indicate that Collaborative Governance in waste management in Pekanbaru City, Riau Province has been running in accordance with the theory put forward by Ansell and Gash (2008). However, there are still challenges such as damage to heavy equipment at the Final Disposal Site (TPA) and the emergence of waste on the roads so that the efforts made are mutual cooperation, reducing the use of plastic waste, converting waste into feed, and implementing waste management recommendations. **Conclusion:** It can be concluded that the implementation of Collaborative Governance in waste management in Pekanbaru City shows a synergistic effort between the government, private sector, and community. However, this collaboration still faces various challenges both internally and externally. In general, the Pekanbaru City Environmental and Sanitation Service (DLHK) still experiences limited resources and knowledge, thus encouraging the involvement of the private sector in the waste transportation process. Lack of incentives and minimal budget also trigger the need for cross-sector collaboration

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Local Government

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Tantangan ini didorong oleh kurangnya pengurangan dan penanganan sampah serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti kerusakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan timbulnya sampah di ruas jalan sehingga Upaya yang dilakukan yaitu gotong royong, mengurangi penggunaan sampah plastik, konversi sampah menjadi pakan, dan melaksanakan rekomendasi pengelolaan sampah. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sehingga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah. Kurangnya insentif dan minimnya anggaran juga menjadi pemicu perlunya kolaborasi lintas sektor

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pasca era reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi besar dalam sistem pemerintahan (Valentina et al., 2025). Paradigma lama yang mengedepankan birokrasi yang sentralistik mulai digantikan oleh pendekatan baru yang lebih demokratis dan partisipatif, yaitu konsep *governance* (Feberina et al., 2021). *Governance* merupakan bentuk pengelolaan pemerintahan yang lebih inklusif, melibatkan berbagai aktor baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil. Salah satu bentuk konkret dari *governance* ini adalah *Collaborative Governance* (Bodin, 2017). Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan proses di mana lembaga-lembaga pemerintah melibatkan aktor-aktor non-pemerintah dalam satu forum kolektif yang berorientasi pada konsensus untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan publik. *Collaborative Governance* merupakan respon dari pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik yang bersifat kompleks dibalik keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya, partisipasi masyarakat (Eka, Setiawandari, Kriswibowo Prodi, et al., 2023).

Dalam konteks pengelolaan sampah, *Collaborative Governance* menjadi sangat relevan karena kompleksitas dan multidimensionalitas permasalahan sampah menuntut kerja sama lintas aktor (Saputra et al., 2025). Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau yang tengah mengalami pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Data dari SIPSN

menunjukkan bahwa pada tahun 2024 volume sampah harian mencapai lebih dari 1.011 ton. Jumlah ini mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat kota dan menunjukkan urgensi penyelesaian yang menyeluruh. Dalam hal ini, konsep Collaborative Governance atau tata kelola kolaboratif menjadi relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Metode ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk mengelola sampah di daerah tersebut (Shockley & Gengler, 2020).

Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membagi pengelolaan sampah ke dalam tiga zonasi serta melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam program 3R merupakan langkah menuju *Collaborative Governance* (Kurnia, 2024). PT. Bina Riau Sejahtera sebagai mitra swasta memiliki tanggung jawab dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah di Zona 1 dan 2, sementara DLHK menangani Zona 3. Di sisi lain, masyarakat didorong untuk aktif berpartisipasi melalui program bank sampah dan TPS 3R (Eka, Setiawandari, & Kriswibowo Prodi, 2023). Namun, berbagai hambatan masih ditemukan dalam praktiknya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah kerusakan alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), ketidakseimbangan infrastruktur antara zona layanan pemerintah dan swasta, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah. Berdasarkan data Renstra DLHK 2024–2026, capaian realisasi retribusi tidak pernah melampaui 51% dari target yang ditentukan. Ini menunjukkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program persampahan.

Selain itu, kurang optimalnya pemanfaatan anggaran yang mencapai 94 miliar rupiah dalam program pengelolaan sampah juga menunjukkan perlunya evaluasi dalam tata kelola anggaran. Program TPS 3R yang sudah diluncurkan sejak 2014 pun belum berjalan maksimal. Keadaan ini memperlihatkan bahwa meskipun terdapat kerangka kolaboratif, tetapi eksekusinya masih belum selaras dengan tujuan awal yaitu mewujudkan Kota Pekanbaru yang bersih dan ramah lingkungan. Melihat dinamika ini, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana *Collaborative Governance* diimplementasikan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Apakah sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

I.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Kota Pekanbaru telah menerapkan prinsip-prinsip dasar *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah, seperti melibatkan sektor swasta dan komunitas masyarakat, namun implementasinya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Terlihat dari meningkatnya volume sampah, rendahnya efektivitas pengangkutan dan pengolahan sampah, serta lemahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Artinya, bentuk kolaborasi yang terjadi belum membentuk sinergi yang kuat antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Selain itu, dalam praktiknya banyak ditemukan kesenjangan antara kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Sebagai contoh, penunjukan PT. Bina Riau Sejahtera sebagai pengelola Zona 1 dan 2 belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan pelayanan, terutama karena sebelumnya zona tersebut dikelola oleh dua perusahaan berbeda sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam sistem operasional. Dalam konteks infrastruktur, distribusi armada pengangkut sampah tidak merata dan sarana prasarana di Zona 3 yang dikelola pemerintah cenderung lebih terbatas dibandingkan swasta.

Masalah lainnya adalah keterbatasan anggaran yang meskipun terlihat besar, belum digunakan secara efektif. Program TPS 3R yang diluncurkan sejak 2014 belum diimplementasikan dengan baik hingga saat ini. Hal ini menjadi indikasi lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan program berbasis kolaborasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam untuk memahami titik-titik kritis dalam penerapan *Collaborative Governance* di Kota Pekanbaru. Dengan menganalisis kesenjangan

antara desain dan pelaksanaan *Collaborative Governance*, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan sampah, serta menjadi referensi untuk praktik di daerah lain

I.3 Penelitian Terdahulu

Ni Komang Ayu Artiningsih (2008) yang judul tesisnya “Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang Kota Semarang).” Dalam penelitiannya mengkaji peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Semarang. Ia menggunakan teori partisipasi Arnstein untuk memahami keterlibatan masyarakat dari tingkat perencanaan hingga implementasi. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan fokus penelitian penulis terkait partisipasi masyarakat, namun berbeda dalam pendekatan teoritis. Artiningsih lebih menyoroTI partisipasi individual, sedangkan penelitian ini melihat kolaborasi lintas aktor.

Saebu Sri Suryo (2021) yang judul skripsinya “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Pesisir)”. Skripsi ini meneliti manajemen pengelolaan sampah oleh DLHK Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Rumbai Pesisir. Ia menggunakan teori manajemen dari Terry untuk menganalisis perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini bermanfaat dalam melihat aspek internal organisasi DLHK, tetapi belum mengkaji kolaborasi dengan sektor luar sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

Muhamamad Chandra Sulaiman (2024) yang judul skripsinya *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penelitian ini melakukan studi serupa dengan menggunakan teori Ansell dan Gash untuk melihat penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan sampah di Kota Palu. Penelitian ini sangat relevan karena menggunakan kerangka teori yang sama. Perbedaannya, Sulaiman fokus pada penanganan sedangkan penelitian ini meneliti lebih kompleks lagi yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

Andi Nur Qalby (2018) yang judul skripsinya *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panukkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat). Penelitian andi ini berfokus pada analisis *collaborative governance* mengenai program bank sampah pusat di suatu daerah sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana kolaborasi yang sudah ada dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Nisa Nursamsiah (2023) yang judul skripsinya “Strategi Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan di Bank Sampah Mpok Sahli Tangerang Selatan.” Penelitian nis ini berfokus mengenai strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sedangkan penelitian ini mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah.

I.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena menggabungkan perspektif *Collaborative Governance* dalam konteks pengelolaan sampah secara langsung pada tingkat kota, khususnya di Kota Pekanbaru. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek internal manajemen, partisipasi masyarakat, atau kajian literatur, penelitian ini secara langsung menilai efektivitas kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menggunakan kerangka empat dimensi dari Ansell dan Gash (2008). Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengkaji upaya mitigasi terhadap hambatan-hambatan kolaboratif melalui pendekatan empiris berbasis data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana strategi penyelesaiannya.

I.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana kolaborasi antar aktor berlangsung, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat proses kolaboratif tersebut, serta bagaimana strategi yang dilakukan oleh masing-masing aktor dalam mengatasi hambatan yang ada. Melalui pendekatan kualitatif, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep *governance* serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, berbeda dengan eksperimen yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data adalah triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dan generalisasi (Sugiyono, 2022).

Peneliti berupaya memahami secara mendalam proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah dengan mengambil studi kasus di Kota Pekanbaru. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali fenomena secara kontekstual dan mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait seperti Ketua DPRD, Kasatpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, perwakilan PT. Bina Riau Sejahtera, perwakilan Bank Sampah TDB, tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, dilakukan pula observasi terhadap aktivitas kolaborasi pengelolaan sampah di lapangan dan dokumentasi terhadap dokumen resmi dan berita lokal.

Metode penelitian yang digunakan merupakan salah satu aspek yang krusial dimana memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data. Karena, data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah representasi dari objek yang diteliti, untuk itu penelitian dengan metode yang tepat akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas data yang diperoleh (Nurdin, 2019)

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Simangunsong, 2017). Kerangka teori yang digunakan adalah model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat dimensi utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran utuh mengenai praktik *Collaborative Governance* dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui dan menganalisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Peneliti menggunakan Teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) yang terdapat 4 dimensi sebagai berikut :

1. Kondisi Awal
2. Desain Kelembagaan
3. Kepemimpinan Fasilitatif
4. Proses Kolaboratif

3.1. Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, pihak pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat berpartisipasi melaksanakan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang terdiri dari 4 Sub Tema yang akan dijelaskan dalam sub bab berikut.

1. Kondisi Awal

Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi awal merupakan salah satu indikator Collaborative Governance yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kerja sama pemerintahan kolaboratif yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun kondisi awal menurut Anshell dan Gash terbagi menjadi tiga bagian yaitu adanya ketidakseimbangan sumberdaya, ketersediaan insentif untuk berpartisipasi, dan adanya ketakutan terjadinya konflik.

a. Sumber Daya dan Pengetahuan

ketidakseimbangan kekuasaan antar pemangku kepentingan adalah masalah yang umum dicatat dalam tata Kelola kolaboratif. Apabila beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya dan pengetahuan untuk 104 berparticipasi dapat menyebabkan proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan pengelolaan sampah dibuktikan dengan pernyataan dari pegawai DLHK yang menyatakan bahwa di DLHK masih kekurangan armada pengangkut sampah sehingga melakukan kolaborasi dengan swasta dalam pengangkutan sampah.

b. Insentif

sifat partisipasi yang sebagian besar secara sukarela, sangat penting untuk memahami insentif yang dimiliki pemangku kepentingan untuk terlibat dalam tata Kelola kolaboratif, sehingga pada kondisi awal payung hukum untuk terkait insentif belum ada sebelum melakukan proses kolaborasi dan juga kondisi anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru yang terbatas dalam membeli armada pengangkutan sampah maka pemerintah berinisiasi menggandeng pihak swasta dalam hal kolaborasi pelayanan pengangkutan sampah.

c. Konflik

Konflik yang terjadi di masa lalu antara pemerintah, swasta, Masyarakat dapat menyebabkan kolaborasi, tetapi akan mengalami sedikit hambatan karena peristiwa masa lalu yang membekas, untuk itu diperlukan penyesuaian kembali supaya dapat menjalin hubungan yang baik antar sektor sehingga proses kolaborasi dapat dilakukan. Ansell dan gash juga menjelaskan bahwa konflik yang tinggi tidak selalu menjadi penghalang untuk melakukan kolaborasi, terjadinya konflik pada kondisi awal ditunjukkan dengan gugatan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pengelolaan sampah yang dimana pemerintah lalai atas kewajibannya untuk melakukan pengelolaan sampah dalam peraturan perundang-undangan baik yang dari pusat maupun aturan turunannya menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan sampah baik itu pengurangan dan penanganan sampah tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

2. Desain Kelembagaan

Menurut ansell dan gash desain kelembagaan mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar dalam berkolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural proses kolaboratif.

a. Partisipasi Forum

partisipasi yang luas tidak hanya untuk diterima secara toleransi tetapi harus dicari secara aktif. Artinya bahwa partisipasi yang akan dilakukan dengan pihak lain harus dipih secara selektif guna mendukung dalam proses kolaboratif..

Gambar 3.1
Forum Konsultasi Publik



Sumber : (ISB Center, 2024)

Dari gambar 4.6 diatas menunjukkan pada tanggal 5 februari 2024 Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang membahas permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru yang salah satu yang dibahas yaitu pengelolaan sampah. Kegiatan bertempat di Hotel Central dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan dan tokoh Masyarakat sehingga partipasi forum dengan maskud membahas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Dari forum yang terjadi akan menjawab dan memberikan solusi dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru untuk kedepannya.

b. Aturan

Dalam jurnal ansell dan gash, Wlessner dan sexton mengungkapkan bahwa aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten menyakinkan pemangku kepentingan bahwa prosesnya adil dan terbuka. aturan mengenai bagaimana kolaborasi dapat dilakukan dengan swasta dan juga Masyarakat sudah di atur jelas dalam peraturan ini sehingga sesuai dengan enam kriteria dalam kolaborasi yang disampaikan oleh ansell dan gash dalam jurnalnya dimana dikatakan forum secara resmi diselenggarakan dan bertemu secara kolektif.

c. Transparansi

transparansi menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dapat merasa yakin bahwa negosiasi publik adalah nyata dan bahwa proses kolaboratif bukanlah kedok untuk kesepakatan pribadi di ruang belakang. Pada pelaksanaan transparansi ini ditandai dengan segala evaluasi terhadap program pengelolaan sampah dipublikasikan di Instagram sehingga stakeholder yang tergabung dalam kolaborasi mengetahui segala bentuk perubahan yang terjadi.

d. Forum Terbatas

Menurut Ansell dan Gash, dengan aktifnya dalam menentukan forum dalam ikut berpartisipasi maka membatasi dengan segala forum yang ada harus dilakukan, karena tujuan mengandeng forum di luar negara untuk dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Gambar 3.2
Penandatanganan komitmen antara Pemerintah Dan Swasta
Dalam Pengelolaan Sampah



sumber : Akun Instagram Bank Sampah TDB,2025

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintah menjalin kolaborasi dengan Bank Sampah TDB dalam hal pengurangan sampah dengan kegiatan pengurangan timbulan sampah di masyarakat. Terjadinya forum terbatas sudah dilakukan ditandai dengan melakukan forum kolaborasi dengan Bank Sampah TDB dalam mengurangi timbulan sampah. Forum telah menggandeng swasta dan komunitas masyarakat dalam penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah, tetapi menurut Ansell dan Gash forum dapat menjalin kolaborasi dengan forum di luar negara dalam menyelesaikan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Itu yang belum terjadi di Kota Pekanbaru dalam hal pengelolaan sampah.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam jurnal Ansell dan Gash mengungkapkan bahwa kepemimpinan sangat penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan pemangku kepentingan dan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi.

a. Memahami Konteks kualitas

kepemimpinan yang diperlukan mungkin tergantung pada konteks yang tepat dan mengetahui konteks yang ada.

Tabel 3.1
Sampah Yang masuk Ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru

Tahun	Rata-rata Sampah yang masuk TPA (Ton/Hari)
2021	804
2022	419,07
2023	624,12
2024	275.938

Sumber : renstra dlhk 2024-2026 perubahan

Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan volume sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, ini membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah belum memahami konteks pengelolaan sampah yang sesungguhnya, dengan kondisi volume sampah yang masih mengalami peningkatan setiap tahunnya kolaborasi yang ada seperti menggandeng swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah baik itu pengurangan maupun penanganan sampah dapat menurunkan volume sampah yang masuk ke TPA.

b. Kompetensi Teknis Rasional

pemimpin harus merangsang kreativitas dengan mensintesis pengetahuan peserta yang beragam sehingga kelompok dapat menciptakan ide dan pemahaman baru, kompetensi teknis rasional yang dimiliki pemimpin baik pemerintah maupun swasta yaitu kemampuan menemukan ide baru guna mengawasi pergerakan angkutan sampah dengan memasang GPS di setiap angkutan yang ada sehingga pergerakan angkutan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA lebih terawasi.

c. Karakteristik Pribadi

kepribadian yang jujur seperti itu juga akan dapat mengembangkan kepercayaan selama proses kolaboratif dengan tetap berada di atas pertikaian dan dengan menjaga integritas prosedural dan transparansi proses kolaboratif, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang ada di pekanbaru atas prestasinya kegiatan Program Adiwiyata yang merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. karakteristik pribadi yang dimiliki oleh komponen yang ada belum maksimal dalam pengurangan dan penanganan sampah ini ditandai dengan program adiwiyata yang notabene sangat penting dimiliki karena dapat menumbuhkan cinta terhadap lingkungan mulia sejak dini, pada saat ini program tersebut melemah dan tidak dilaksanakan secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

4. Proses Kolaborasi

Model proses tata Kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap dengan tujuan yang linear. Model panggung kolaborasi penting untuk menarik perhatian pada perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks (Ansell & Gash, 2008)

a. Dialog Tatap Muka

semua tata Kelola kolaboratif dibangun di atas dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, komunikasi dalam dialog diperlukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi peluang untuk saling menguntungkan.

Gambar 3.3
Dialog Rutin Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat



Sumber: DLHK, 2025

Dapat dilihat bersama Pemerintah, swasta dan masyarakat melakukan dialog tatap muka rapat pengelolaan persampahan tahun 2024 dilakukan di Kantor DLHK Kota Pekanbaru Kegiatan rutin setiap sebulan ini membahas kolaborasi dalam pengelolaan sampah yang mengundang swasta dan Masyarakat setiap pertemuan yang ada dalam membahas perkembangan kolaborasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah baik itu pengurangan maupun pengelolaan. Dari observasi yang ada kegiatan dialog tatap muka sudah rutin diadakan setiap bulan yang menunjukkan proses kolaborasi berjalan.

b. Membangun Kepercayaan

Dalam jurnal Ansell dan Gash diungkapkan bahwa proses kolaboratif bukan hanya tentang negosiasi tetapi juga tentang membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Pekanbaru turun langsung ke lapangan melihat kondisi sampah yang belum terangkut. Kemudian langsung menghubungi pihak terkait untuk segera mengangkut sampah yang berserakan tersebut. Dengan ini pemerintah menunjukkan dirinya agar dapat membangun kepercayaan yang baik kepada Masyarakat dengan hal demikian.

c. Komitmen Terhadap Proses

Guna meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengelolaan sampah. Dari sini dilihat bahwa komitmen pemerintah untuk berkolaborasi sangat nyata ditunjukkan, komitmen terhadap proses pengelolaan sampah seperti berkolaborasi sudah ada, tetapi konsisten untuk melaksanakan komitmen tersebut yang menjadi suatu masalah yang terjadi.

d. Pemahaman Bersama

pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai secara kolektif bersama. Pemerintah Kota Pekanbaru mengundang swasta dan Masyarakat untuk membahas pemahaman bersama dalam pengelolaan sampah. pemahaman bersama sudah dilakukan dengan mengadakan rapat pengelolaan sampah untuk mendudukkan pemahaman bersama mengenai pengelolaan sampah, tetapi terkadang

masih ada oknum di luar sektor yang masih melanggar kesepakatan yang sudah diatur dalam Perda pengelolaan sampah yang disebabkan masih terjadinya ego sektoral yang dimiliki masing-masing stakeholder, dan juga pemahaman yang dimiliki oleh pemerintah dalam menuntaskan masalah sampah ini masih sebatas kolaborasi dengan swasta dalam pengangkutan saja tetapi kolaborasi dengan yang lainnya dalam hal mengurangi dan menangani sampah belum terlaksana dengan maksimal.

e. Hasil sementara

Sejumlah studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi Ketika kemungkinan tujuan dan keuntungan kolaborasi relative konkret dan Ketika kemenangan kecil dari kolaborasi dimungkinkan. Artinya hasil yang terbaik dapat tercapai apabila ada tujuan dan kolaborasi konkret dari setiap pemangku kepentingan.

Gambar 3.4

Pj Walikota Pekanbaru Terima sertifikat Adipura dari KemenLKH



Sumber: transriau.com, 2023

Dapat dilihat pada gambar diatas diaman pada, selasa 28 Februari 2023 di Aula Manggala Wanabakti Gedung Kemen LHK Pj. Walikota Pekanbaru menerima penghargaan adipura sebagai salah satu kota bersih di Indonesia, tetapi masih ada pekerjaan rumah Kota Pekanbaru yang disampaikan pada saat penyerahan tersebut seperti pembenahan TPA, Upaya pengurangan produksi sampah. Menunjukkan bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan baik dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya dibuktikan dengan penerimaan penghargaan adipura, tetapi masih ada yang harus diperbaiki terkait membenahi TPA dan mengurangi produksi sampah.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dilakukan secara kolaborasi oleh pemerintah, swasta dan Masyarakat tentunya masih terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan di lapangan mengungkapkan bahwa masih terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang dibuktikan dengan wawancara dan observasi dengan para informan yang telah dipih sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

1. Faktor Pendukung

Faktor ini mengungkapkan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan yang mendukung pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Faktor ini terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal.

a. Faktor Pendukung Internal

Faktor ini nantinya akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk mengungkapkan tata Kelola kolaboratif yang dilakukan dalam mendorong secara positif untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik yang berasal dari dalam sektor yang terlibat dalam kolaborasi.

Gambar 3.5
Bank Sampah Binaan DLHK Kota Pekanbaru



Sumber: DLHK, 2025

Bank Sampah binaan DLHK yaitu Bank Sampah Berlian Labuai dan Bank Sampah Bukit Hijau Berlian yang dimana bank sampah ini menjadi tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu faktor pendorong untuk pemilahan dan pengumpulan sampah dalam hal penanganan sampah sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan mendirikan Bank Sampah. Bank sampah ini dapat membantu swasta dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA karena Sebagian sampah sudah dipilah untuk didaur ulang. Tidak hanya itu saja anggaran besar yang dimiliki DLHK dapat menggandeng pihak swasta dalam hal pengangkutan sehingga dengan adanya bank sampah dan anggaran yang besar dapat mendorong pengelolaan sampah baik untuk pengurangan dan penanganan.

b. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor ini nantinya akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk mengungkapkan tata Kelola kolaboratif yang dilakukan dalam mendorong secara positif untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik yang berasal dari luar sektor yang terlibat dalam kolaborasi.

Tabel 4.2

TPS 3R yang dibangun Satker PPLP Kementerian Pekerjaan Umum

No	Nama	Tempat
1	TPS 3R Mandiri Bersama	Jl. Damai Kec. Tampan
2	TPS 3R Berkah Abadi	Jl. Limbungan Kec. Rumbat Pesisir
3	TPS 3R Berdikari	Jl. Pebatuan Kec. Tenayan Raya
4	TPS 3R Ikhlas	Jl. Ikhlas, Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya
5	TPS 3R Dirgantara Maju	Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai

Sumber: Renstra DLHK 2024-2026 Perubahan

Pada tabel di atas merupakan lima TPS 3R yang dibangun oleh SatkerPPLP Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.

bahwa faktor pendorong eksternal memberikan dorongan dalam programnya masing-masing. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum mendirikan TPS 3R di pekanbaru untuk mendorong pengelolaan sampah secara eksternal. Akan tetapi yang menjadi masalahnya, untuk TPS 3R ini sendiri belum optimal karena terkendala biaya operasional dan adanya perubahan susunan keanggotaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Pembinaan TPS 3R ini sudah diserahkan kepada DLHK, namun karena belum ada serah terima asset sehingga untuk operasional TPS 3R belum dapat dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru.

2. Faktor Penghambat

Faktor ini mengungkapkan bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan yang menghambat pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Faktor ini terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

a. Faktor Penghambat Internal

Faktor ini nantinya akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk mengungkapkan tata Kelola kolaboratif yang dilakukan dalam menghambat untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik yang berasal dari dalam sektor yang terlibat dalam kolaborasi. sering terjadi mengenai faktor penghambat internal yaitu alat berat seperti *bulldozer*, *excavator*, dan *compactor* yang digunakan untuk meratakan dan memadatkan sampah sering mengalami kerusakan sehingga proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA mengalami keterlambatan. Ditambah lagi pemerintah yang belum mampu membuat inovasi baru dalam hal pola pengangkutan sampah.

b. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor ini nantinya akan menunjukkan bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk mengungkapkan tata Kelola kolaboratif yang dilakukan dalam menghambat untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik yang berasal dari luar sektor yang terlibat dalam kolaborasi. beberapa faktor yang menghambat secara eksternal dalam hal kegiatan swasta dalam pembatasan timbulan sampah dihambat karena program digital yang mereka miliki belum semua masyarakat dapat mengaksesnya. Pedagang dari luar yang belum mengetahui aturan mengenai waktu dan tempat membuang sampah di Kota Pekanbaru. Ditambah lagi banyak masyarakat termakan hoaks karena berita yang disebarluaskan pada Masyarakat terkait penggelapan anggaran pengelolaan sampah.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dilakukan supaya pengelolaan sampah baik itu untuk pengurangan dan penanganan sampah dapat dilakukan dengan melibatkan sektor di luar dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan mengungkapkan masih ada hambatan yang terjadi sehingga dibutuhkan upaya mengatasi baik itu upaya langsung maupun upaya tidak langsung.

1. Upaya Langsung Internal

upaya langsung internal setiap sektor sudah melakukan upaya dengan turun langsung ke lapangan untuk membersihkan ruas jalan yang terdapat timbulan sampah sehingga kegiatan ini dapat secara langsung bermanfaat secara langsung terhadap timbulan sampah yang ada.

2. Upaya Langsung Eksternal

bahwa upaya langsung secara eksternal sudah ada dengan dibuktikan kolaborasi dengan swasta dan Masyarakat dalam melakukan gotong royong dan juga alfamart sebagai penyedia barang sudah melakukan kegiatan pembatasan timbulan sampah dengan meminimalisir penggunaan sampah plastik.

3. Upaya Tidak Langsung Internal

Upaya tidak langsung internal seperti penanganan sampah pada bagian pengelolaan sampah dilakukan dengan mengubah sampah organik menjadi pakan ternak yang dilakukan oleh pekanbaru changemakers. Ditambah lagi sesuai aturan dari Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 yang mewajibkan produsen menarik sampahnya kembali, ini belum terlaksana dengan baik padahal ini dapat menjadi upaya tidak langsung dalam mengurangi timbulan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

4. Upaya Tidak Langsung Eksternal

upaya tidak langsung eksternal yaitu BPK memberikan perhatian kepada Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah dengan memberikan rekomendasi penyelesaian pengurangan dan penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Ditambah lagi adanya bantuan operasional yang diberikan dari rumah zakat untuk menjalankan program yang dilakukan oleh pekanbaru changemakers dalam mengubah sampah menjadi maggot

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada Penelitian yang dilaksanakan oleh Ni Komang Ayu Artiningsih (Artiningsih, 2008) memiliki beberapapersamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Artiningsih dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan juga ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah di suatu daerah ,sedangkan perbedaan penelitian Ni Komang Ayu Artiningsih dengan dengan penelitian ini adalah peneltian Ni Komang Ayu Artiningsih berfokus mengenai bagaimana keadaan pengelolaan sampah di lapangan dan memberikan usulan saran penyelesaian ,sedangkan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Konsep “*Collaborative Governance* “dalam pengelolaan sampah .

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saebu Tri Suryo (Suryo, 2021) berdasar penelitian yang telah dilakukan oleh Saebu Tri Suryo memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana peramaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut Persamaan Penelitian yang dilakukan Saebu Tri Suryo dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan sama di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Saebu Tri Suryo dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saebu Tri Suryo ini menitikberatkan pada manajemen pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ,Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kebijakan penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelola

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Candra Sulaiman (Sulaiman, 2024) memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chandra Sulaiman dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan collaborative governance dengan teori ansell dan gash mulai dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi ,faktor pendorong dan penghambat, juga upaya untuk mengatasi faktor penghambat,sedangk an perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chandra Sulaiman dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Chandra Sulaiman yaitu lebih berfokus pada penanganan masalah sampah yang dimana penanganan seperti pengumpulan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah, sedangkan penelitian ini berfokus mengenai pengelolaan sampah yang

dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah itu terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan Kembali sampah dan untuk penanganan sampah seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nursamsiah (Sulaiman, 2024) memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain adalah Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Nursamsiah dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif dan menyangkut mengenai pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian Nisa Nursamsiah dengan penelitian ini yaitu Nisa Nursamsiah berfokus mengenai strategi pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sedangkan penelitian berfokus menganalisis ini Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Qalby (Qalby, 2028) memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Qalby dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nur Qalby dengan penelitian ini adalah penelitian Andi Nur Qalby lebih berfokus pada analisis Collaborative Governance mengenai program bank sampah pusat di suatu daerah sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah secara menyeluruh di suatu daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sehingga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah. Kurangnya insentif dan minimnya anggaran juga menjadi pemicu perlunya kolaborasi lintas sektor.

Dari sisi kelembagaan, forum-forum partisipatif telah dibentuk untuk merumuskan solusi dan kebijakan pengelolaan sampah, dengan aturan kolaborasi yang telah diatur secara formal dan transparansi informasi yang disampaikan melalui media sosial. Meski demikian, kolaborasi ini masih terbatas secara lokal dan belum mencakup kerja sama lintas negara. Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif telah mulai diterapkan, terlihat dari penggunaan inovasi teknologi seperti GPS pada armada pengangkut sampah. Namun, kelemahan masih terlihat dalam aspek karakter personal, khususnya pada menurunnya implementasi program-program pendidikan lingkungan seperti Adiwiyata.

Proses kolaborasi telah berjalan melalui dialog tatap muka rutin dan upaya membangun pemahaman bersama. Akan tetapi, kepercayaan antar pihak belum sepenuhnya terbentuk akibat inkonsistensi kebijakan pemerintah dan dominannya pendekatan simbolik dibandingkan tindakan nyata di lapangan. Faktor pendukung pengelolaan sampah antara lain hadirnya bank sampah dan keterlibatan masyarakat, sementara TPS 3R masih menghadapi kendala operasional. Hambatan internal meliputi kerusakan alat berat pengolah sampah, sedangkan hambatan eksternal berasal dari rendahnya akses masyarakat terhadap program digital dan kurangnya kesadaran pedagang luar terhadap aturan pembuangan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sektor pemerintah telah turun ke lapangan untuk menangani timbulan sampah, dan pihak swasta mulai menerapkan kebijakan ramah lingkungan seperti pengurangan plastik. Selain itu, terdapat inovasi pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak serta dukungan eksternal dari lembaga zakat dan BPK yang memberikan perhatian terhadap perbaikan tata kelola persampahan.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* di Kota Pekanbaru telah menunjukkan arah yang positif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek komitmen, kepemimpinan berkelanjutan, dan integrasi lintas sektor untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif sehingga belum menunjukkan secara kuantitatif dampak dari kolaborasi yang dilakukan, seperti penurunan volume sampah atau tingkat partisipasi publik. Keempat, beberapa data yang digunakan bersumber dari dokumentasi media sosial pemerintah yang bersifat simbolik dan belum sepenuhnya divalidasi melalui observasi atau wawancara langsung. Terakhir, pembahasan mengenai implementasi teknis kebijakan seperti TPS 3R, penggunaan teknologi GPS, dan pengoperasian bank sampah belum dikaji secara teknokratik dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai evaluasi lapangan yang lebih menyeluruh dan kajian teknis terhadap implementasi kebijakan, seperti penggunaan GPS dan operasional bank sampah. Tak kalah penting, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga menjadi aspek yang layak diteliti guna memperkuat keberlanjutan kolaborasi di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru, pihak swasta yang terlibat serta masyarakat yang telah memberikan informasi terkait permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam hal ini adalah *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru, serta kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Artiningsih, N. K. A. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)*. <https://core.ac.uk/download/pdf/11718046.pdf>
- Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. *Science*, 357(6352). <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Eka, N., Setiawandari, P., & Kriswibowo Prodi, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance In Waste Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Eka, N., Setiawandari, P., Kriswibowo Prodi, A., Publik, A., Veteran, U., Timur, J., & Koresponden, S. *. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH COLLABORATION GOVERNANCE IN WASTE MANAGEMENT. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 2). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Feberina, A., Mulyadi, A. W. E., & Haryanti, R. H. (2021). Collaborative governance in solving problem air pollution in Indonesia: a systematic literature review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1), 012097. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012097>

- Kurnia, S. L. (2024). *COLLABORATIVE GOVERNANCE STUDI KASUS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KOTA PEKANBARU* [UINSultanSyarifKasimRiau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/83423>
- Nurdin, A. H. M. (2019). *PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI INDONESIA* (E. Herdiawan, Ed.; Pertama). CV CENDEKIA PRESS.
- Nursamsiah, N. (2023). *Strategi Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan di BANK Sampah Mpok Sahli Tangerang Selatan* [UINSyarifHidayatullahJakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73879>
- Qalby, A. N. (2028). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panukkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)* [UniversitasMuhammadiyahMakassar]. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4422-Full_Text.pdf
- Saputra, T., Zuhdi, S., & Setiawan, I. (2025). Charting a Greener Future: Collaborative Governance Dynamics in Pekanbaru Sustainable Waste Management. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(04), 1655–1663. <https://doi.org/10.18280/ijmdp.200427>
- Shockley, B., & Gengler, J. J. (2020). Social identity and coethnic voting in the Middle East: Experimental evidence from Qatar. *Electoral Studies*, 67, 102213. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102213>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif* (Edisi Kedu). CV. ALfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedu). CV. ALfabeta.
- Sulaiman, M. C. (2024). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Masalah Sampah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah* [InstitutPemerintahanDalamNegeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/17105>
- Suryo, S. T. (2021). *YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9714>
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Salsabila, L. (2025). Collaborative Governance in Handling the Waste Crisis: A Systematic Literature Review. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(2), 761–770. <https://doi.org/10.18280/ijmdp.200225>